

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan kepala daerah merupakan proses rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati ataupun Walikota/Wakil Walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan luas. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi seorang pemimpin, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Calon pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luas merupakan *asset* yang sangat berharga bagi partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan tersebut perlu diberdayakan (Firmanzah, 2008: 70-71).

Menurut Purwoko (2005: 12), pemilihan umum kepala daerah pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan Dede dan Caroline dalam Purwoko (2005: 12) menerangkan tentang mekanisme Pemilukada secara langsung dapat diyakini sebagai solusi ke arah penguatan demokrasi di tingkat lokal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa, sehingga

adanya perubahan pola pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik membawa pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah termasuk pula tentang kewenangan politik di tingkat lokal.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam memilih pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut, paling tidak, dalam tataran prosedural. Hal tersebut berkorelasi positif dengan konsep otonomi daerah dan desentralisasi, di mana kadar partisipasi rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, maupun dalam menentukan arah kebijakan publik. Mengutip pendapat Dahl dalam Fitriyah (2005: 297) bahwa demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal.

Ada sejumlah alasan yang memperkuat argumen bahwa pemilukada langsung pantas dilaksanakan, di antaranya adalah sebagai kritik terhadap demokrasi perwakilan yang melahirkan wakil-wakil rakyat yang mengabaikan kepentingan pemilihnya, dan upaya untuk mengutamakan kembali partisipasi rakyat dalam menentukan pilihannya (Romli 2005:279); merupakan prosedur untuk kompetisi politik yang damai, amanat konstitusi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2014 , solusi terhadap rekrutmen kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD yang melahirkan politik uang, sarana pembelajaran politik bagi warga (Purwoko 2005:7-8); sebagai perwujudan otonomi daerah yang seluas-luasnya (Amirudin & Bisri 2005:14).

Dalam pelaksanaan pemilukada langsung tersebut, tahapan persiapan ataupun tahapan pelaksanaan diatur oleh KPUD dan untuk selanjutnya akan berpedoman pada PP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pasangan calon berhak untuk melakukan kampanye. Pasal 1 menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota. Kampanye sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan pemilukada dengan jadwal yang ditentukan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi serta semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun, termasuk di dalamnya partai politik, membutuhkan pendekatan alternatif dalam kampanye. Dalam konteks inilah marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang berkembang di dunia bisnis diasumsikan berguna bagi institusi politik (Firmanzah 2008:127).

Marketing politik merupakan cara untuk merebut hati konstituen dan membuat mereka memilih kandidat yang diinginkan. Persaingan menuntut para kandidat untuk memikirkan cara dan metode yang efektif dalam berkomunikasi dan meyakinkan konstituen bahwa mereka layak dipilih (Cangara 2009:148). Salah satu strategi marketing politik adalah melalui kampanye. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Dalam konteks komunikasi politik, menurut Chaffe dalam Cangara (2009:276), kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan

terhadap suatu hal atau seorang kandidat, sedangkan menurut Imawan dalam Cangara (2009:276) kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.

Menurut Lock dan Harris dalam Firmanzah (2008:275) kampanye politik terkait erat dengan pembentukan *image* politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan *image* yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat. Faktor utama penyebab seseorang bisa meraih kemenangan adalah sejauh mana kemampuannya dalam mencitrakan diri sehingga masyarakat mengenalnya dan bersimpati padanya. Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menjadi pemenang. Ada strategi yang positif (sesuai dengan aturan) dan ada juga yang negatif, seperti: *money politic*, *black campaign*, manipulasi suara dan sederet kecurangan lainnya. Di antara strategi yang kerap dimainkan dalam kompetisi politik baik pada pemilu anggota legislatif, pilpres atau pemilu kepala daerah adalah mengangkat sebuah opini dan isu yang menyita perhatian publik dan menimbulkan simpati bagi para pemilih. Selain itu, ada juga strategi kampanye dengan menempatkan figur atau tokoh di balik partai, ideologi atau kepentingan, dan janji yang diusung.

Ada sebuah fenomena menarik dalam ajang pemilukada yaitu terdapatnya petahana yang sebagian besar menang dalam setiap persaingan menduduki kursi

orang nomor satu di daerah. Hal tersebut terjadi karena, selain memiliki dukungan beberapa jaringan dan mesin politiknya yang cukup solid, kandidat petahana ini mempunyai *image position* sebagai pejabat yang populer di mata publik. Apalagi jika proses tersebut ditopang dengan kinerja figur yang positif tentunya akan semakin memperkuat korelasi antara pemilihan dan calon kandidat dalam hal memperoleh kemenangan (Firmanzah 2008: 229). Fenomena ikutnya calon petahana juga terjadi dalam pemilukada langsung Kota Banjar yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018.

Ade Uu Sukaesih merupakan calon wali kota Banjar petahana di Pilwalkot Banjar 2018. Ia adalah istri dari wali kota Banjar Herman Sutrisno, yang menjabat dua periode pada 2004-2008 dan 2008-2013. Deklarasi pencalonan Ade-Nana diumumkan oleh suami Ade, Herman Sutrisno, selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar pada Oktober 2017. Adapun partai pengusung untuk kedua calon Walikota Banjar periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Partai Pengusung Paslon Walikota Banjar Periode 2018-2023

No	Paslon	Partai	Kursi di DPRD	Jumlah Kursi Pendukung
1	Ade UU Sukaesih Nana Suryana	PKB	1	11
		Golkar	6	
		PDIP	4	
2	Maman Suryaman Irma Darmawatie Bastaman	Gerindra	3	14
		Demokrat	2	
		PAN	3	
		PPP	2	
		Hanura	2	
		PKS	2	
Jumlah Kursi DPRD Kota Banjar			25	25

Sumber: KPU Kota Banjar. 2018.

Jika dilihat dari partai pendukungnya, pada Tabel 1.1 diperoleh data pasangan Maman Suryaman dan Irma Darmawatie Bastaman didukung oleh 6 partai dengan 14 kursi di DPRD Kota Banjar, sedangkan pasangan Ade UU Sukaesih dan Nana Suryana hanya didukung oleh tiga partai yang hanya memiliki 11 kursi di DPRD Kota Banjar. Jika melihat perolehan suara partai pada pemilu legislatif, maka pasangan Ade UU Sukaesih dan Nana Suryana mempunyai dukungan partai lebih sedikit dari pasangan Maman Suryaman dan Irma Darmawatie Bastaman, namun pada kenyataannya, pada Pemilu Kota Banjar tahun 2018, perolehan suara pasangan Ade UU Sukaesih dan Nana Suryana mengungguli pasangan Maman Suryaman dan Irma Darmawatie Bastaman.

Sebagai istri dokter, Ade aktif di organisasi yang menaungi Ikatan Istri Dokter di Ciamis, ia pernah menjabat Ketua IDI Ciamis. Selain itu, Ade juga pernah menjabat Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Ciamis pada 1996-1999 dan Ketua Dharma Wanita RSU Banjar-Ciamis pada 2002-2004. Pendidikan tinggi Ade dimulai pada 1971 di Akademi Bank Jakarta. Tahun 2004, Ade kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Bina Putra Banjar. Setelah itu, ia menamatkan S2 di Universitas Pasundan Bandung 2011. Empat tahun berikutnya, Ade meraih gelar doktor di Universitas Pasundan. Saat mendampingi suaminya, sebagai istri wali kota, Ade Uu Sukaesih dikenal rajin mendatangi posyandu di kampung-kampung. Perhatiannya di bidang kesehatan memang sangat besar. Begitu menjabat walikota pada 2003, Ade semakin memfokuskan perhatian pada bidang kesehatan. (Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/tags/pilwalkot-banjar-2018>)

Program utama Ade adalah merevitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu). Bagi Ade, manfaat posyandu sangat besar sebab dapat menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Berkat program revitalisasi posyandu dan revitalisasi kader posyandu. Pada tanggal 19 Agustus 2014, Kota Banjar mendapatkan Anugerah Revitalisasi Posyandu dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Konsistensi Ade merevitalisasi posyandu juga membawa Banjar mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Candu Asmara (Becak Posyandu Angkutan Swadaya Masyarakat) pada 31 Maret 2016. (Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/tags/pilwalkot-banjar-2018>)

Di bidang tata kelola pemerintahan, Banjar mendapatkan penghargaan pemerintahan daerah dengan prestasi kinerja sangat tinggi yang diserahkan oleh gubernur Jawa Barat. Pada 30 Mei 2016, Banjar juga mendapatkan Investment Award, sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kota terbaik ketiga se-Indonesia dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Tahun 2017, Ade juga menerima penghargaan personal yakni Satya Lencana Bhakti Praja Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kepala daerah berprestasi bersama dua belas kepala daerah lain di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pilkada serentak 2018 Kota Banjar, Kamis 26 Juli 2018, bertempat di Gedung Graha Banjar Idaman (GBI), Kota Banjar. Paslon nomor urut satu Ade Uu Sukaesih-Nana Suryana unggul dengan perolehan suara 52,36% suara, sementara paslon nomor 2 Maman-Irma Bastaman memperoleh 47,64% suara. Data yang

masuk berasal dari 332 TPS atau sudah mencapai 100 persen, total suara masuk hak pilih 113.974 suara, yang sah sebanyak 110.804 suara dan yang tidak sah 3.170 suara. Paslon petahana Ade Uu Sukaesih-Nana Suryana memperoleh 58,020 suara, sementara paslon Maman-Irma Bastaman memperoleh 52,784 suara, atau selisih sekitar 5.000 suara. Perolehan suara Ade Uu Sukaesih ini menurun dibandingkan dengan perolehan suara pada Pilwalkot Banjar tahun 2013, dimana pada saat itu dengan 5 pasangan calon Walikota Banjar, Ade Uu Sukaesih dengan nomor urut 4, berpasangan dengan Drg. H. Darmaji Prawirasetia, M.Kes yang didukung oleh 7 partai politik (Golkar, Gerindra, PPP, PKPI, PKB, PKS dan PAN) memperoleh suara 67,43%.

Ade Uu Sukaesih merupakan calon Walikota Banjar petahana yang sudah mempunyai pengalaman dalam kemenangan pada Pemilukada Kota Banjar tahun 2014, walaupun pada Pemilukada tahun 2018 didukung oleh partai yang lebih sedikit dari paslon lawannya, namun setidaknya Ade Uu Sukaesih sudah mempunyai pengalaman *marketing* politik dalam Pemilukada Kota Banjar, dan selama menjabat Walikota Banjar periode 2013 – 2018 sudah menjalankan *marketing* politik dalam program kerjanya, dan mempunyai keuntungan yang lebih baik dari paslon saingannya dikarenakan mempunyai waktu yang lama dalam mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi *Marketing* Politik Pasangan Ade Uu Sukaesih Dan Nana Suryana Pada Pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah strategi *marketing* politik pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana pada pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan strategi *marketing* politik pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana pada pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *marketing* politik pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana pada pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, serta diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan atau sebagai referensi dalam memahami strategi *marketing* politik pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana pada pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Dengan tujuan yang telah ditetapkan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya: Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu politik. Pengembangan tersebut diharapkan bisa menjadi bahan materi perkuliahan dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan upaya apa saja yang dilakukan pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana pada pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018 dan Tim suksesnya dalam strategi pemenangan Pemilukada Kota Banjar.